

BAGIAN ANGGARAN 032



LAPORAN KEUANGAN

SATKER BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

AUDITED

TAHUN ANGGARAN 2025

**JALAN HUSEIN HAMZAH NOMOR 01 PALLIMA PONTIANAK
KALIMANTAN BARAT**

Telp. (0561) 766691, email : bpslpontianak@gmail.com

<http://bpslpontianak.kkp.go.id/>

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Mei 2026

Pontianak
Kepala Balai

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si
NIP. 19740513 200901 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Penjelasan Umum
 - B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - F. Pengungkapan Penting Lainnya
- VI. Lampiran dan Daftar

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Audited Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, Mei 2026



Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si
NIP. 19740513 200901 1 004

Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 2) PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- 3) PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 4) PMK Nomor 173 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
- 5) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2/PB/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (Unaudited).

dan berdasarkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur – unsur Laporan Realisasi Anggaran adalah Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 2,245,211,031 atau mencapai 124,7 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 1,800,000,000.

Realisasi Belanja Negara pada Periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 26,199,742,479 atau mencapai 85,77 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 30,545,579,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 27,779,619,094 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 204,883,425; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 27,574,735,669; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing – masing sebesar Rp 222,142,218 dan Rp 27,557,476,876.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2,232,768,940 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 20,524,321,714 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (18,291,552,774). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 8,356,446 dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (18,283,196,328).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 21,886,141,756 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (18,283,196,328) kemudian dikurangi dengan koreksi – koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 23,954,531,448 juga dikurangi kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar Rp 5,671,335,120 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 27,557,476,876.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan - pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1,800,000,000	2,245,211,031	125	2,421,607,418
JUMLAH PENDAPATAN		1,800,000,000	2,245,211,031	125	2,421,607,418
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	7,872,395,000	7,191,137,406	91	6,629,118,081
Belanja Barang	B.4	15,452,684,000	11,907,139,807	77	11,246,647,116
Belanja Modal	B.5	7,220,500,000	7,101,465,266	98	864,230,822
JUMLAH BELANJA		30,545,579,000	26,199,742,479	86	18,739,996,019

II. NERACA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK NERACA

PER 31 Desember 2025 dan 2024

(DalamRupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran		200,000,000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Belanja dibayar di Muka (prepaid)		-	-
Piutang Bukan Pajak		-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		-	-
Persediaan		4,883,425	2,910,400
JUMLAH ASET LANCAR		204,883,425	2,910,400
ASET TETAP			
Tanah		16,176,340,000	16,176,340,000
Peralatan dan Mesin		13,989,194,464	7,549,546,769
Gedung dan Bangunan		4,221,848,220	4,221,848,220
Jalan. Irigasi dan Jaringan		690,656,250	690,656,250
Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan	-	7,503,303,265	6,735,010,137
JUMLAH ASET TETAP		27,574,735,669	21,903,381,102
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain		-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		27,779,619,094	21,906,291,502
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga		222,142,218	20,149,746
Utang Yang Belum Ditagihkan		-	-
Uang Muka dari KPPN		-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		222,142,218	20,149,746
JUMLAH KEWAJIBAN		222,142,218	20,149,746
EKUITAS			
Ekuitas		27,557,476,876	21,886,141,756
JUMLAH EKUITAS		27,557,476,876	21,886,141,756
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27,779,619,094	21,906,291,502

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	2,232,768,940	2,409,841,914
JUMLAH PENDAPATAN		2,232,768,940	2,409,841,914
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	7,191,137,406	6,629,118,081
Beban Persediaan	D.3	155,807,707	93,824,946
Beban Barang dan Jasa	D.4	10,066,347,077	4,709,257,917
Beban Pemeliharaan	D.5	418,135,121	273,244,791
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,266,869,349	6,133,951,452
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	212,635,000
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1,426,025,054	785,918,040
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		20,524,321,714	18,837,950,227
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(18,291,552,774)	(16,428,108,313)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	8,692,000	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3,750,091	26,265,504
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		4,085,645	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		8,356,446	26,265,504
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(18,283,196,328)	(16,401,842,809)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.12	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(18,283,196,328)	(16,401,842,809)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	21,886,141,756	21,984,095,964
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18,283,196,328)	(16,401,842,809)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	(14,500,000)
LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.5	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.7	-	(14,500,000)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.8	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		23,954,531,448	16,318,388,601
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		5,671,335,120	(97,954,208)
EKUITAS AKHIR	E.9	27,557,476,876	21,886,141,756

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Akuntansi Istimewa Pontianak

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau – pulau kecil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor [PER.22/MEN/2008](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut tanggal 17 November 2008.

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak diresmikan pada tanggal 27 Januari 2009 yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau – pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI adalah Sistem Akuntansi Terintegrasi. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan BMN dan Laporan Persediaan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai

Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos – pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode Januari s.d Desember Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip – prinsip, dasar – dasar, konvensi – konvensi, aturan – aturan dan praktik – praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan – kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau

dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan

hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di

atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain – Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan

Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain – lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2019 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos – pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2018 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua. Keterbandingan penyajian akun – akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2019 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPSPL Pontianak Tahun Anggaran 2025 memiliki total pagu anggaran sebesar Rp 30,545,579,000. Nilai total pagu anggaran dengan rincian sumber dana sebagai berikut :

Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 10,910,579,000.

PNBP sebesar Rp 19,635,000,000.

*Realisasi
Pendapatan Rp
2,245,211,031*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2,245,211,031 atau mencapai 124,7 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp

1,800,000,000. Pendapatan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	8,692,000
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	4,043,825
Pendapatan Perizinan Lainnya	903,420,000	1,051,110,000
Pengembalian Pendapatan Perizinan Lainnya	0	-
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	896,580,000	1,176,583,035
Pengembalian Pendapatan Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,032,080
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,750,091
Jumlah	1,800,000,000	2,245,211,031

Realisasi Pendapatan Periode Tahun Anggaran 2025 BPSPL Pontianak adalah :

- a) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi Rp 4,043,825 adalah pendapatan atas penggunaan rumah dinas.
- b) Pendapatan dari Jasa Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1,176,583,035 berupa pemungutan pengambilan alam dan pemungutan perdagangan.
- c) Pendapatan dari Pelayanan Perizinan Lainnya sebesar Rp 1,051,110,000 berupa penerbitan dokumen SAJI dan dokumen Rekomendasi.

- d) Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp 1,032,080 adalah denda keterlambatan pengadaan seragam pegawai.
- e) Penerimaan kembali belanja barang dan pegawai TAYL sebesar Rp 3,750,091 adalah potongan SPM atas Pembayaran Kekurangan Gaji bulan November tahun 2024 s.d. bulan Februari tahun 2025 atas Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional.

Realisasi
Belanja Negara
Rp
26,199,742,479

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 26,199,742,479 atau 85,77% dari anggaran belanja sebesar Rp 30,545,579,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7,872,395,000	7,196,133,637	91.41
Belanja Barang	15,452,684,000	11,909,191,039	77.07
Belanja Modal	7,220,500,000	7,101,465,266	98.35
Total Belanja Kotor	30,545,579,000	26,206,789,942	85.80
Pengembalian	-	7,047,463	-
Jumlah	30,545,579,000	26,199,742,479	85.77

Belanja Pegawai
Rp
7,191,137,406

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Periode sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7,191,137,406.

Rincian Belanja Pegawai

URAIAN	2025
Belanja Gaji, Tunjangan Gaji dan	3,475,813,056
Belanja Lembur	118,788,000
Belanja Tunj. Khusus	3,601,532,581
Jumlah Belanja Kotor	7,196,133,637
Pengembalian Belanja Pegawai	4,996,231
Jumlah Belanja	7,191,137,406

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diberikan kepada pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BPSPL Pontianak memiliki total pegawai 54 orang dengan detail: 45 orang PNS, 2 CPNS, 3 orang PPPK Lama, 3 orang PPPK Baru, dan 1 PPPK Paruh Waktu.

1 orang PPPK pada BPSPL Pontianak mulai bekerja Desember 2023.

2 orang PPPK pada BPSPL Pontianak mulai bekerja Maret 2024.

2 orang CPNS pada BPSPL Pontianak mulai bekerja Juni 2025.

3 orang PPPK pada BPSPL Pontianak mulai bekerja Oktober 2025.

1 orang PPPK Paruh Waktu pada BPSPL Pontianak mulai bekerja Oktober 2025.

Pengembalian belanja pegawai adalah pengembalian atas belanja gaji pokok PNS senilai Rp 1,031, atas pembulatan gaji PNS senilai Rp 200 dan pengembalian atas tunjangan umum PNS senilai Rp 4,995,000. Semua pengembalian adalah bentukan langsung (otomatis) aplikasi gaji PPABP, setoran atau potongan langsung bersamaan dengan SPM.

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp

11,907,139,807

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 11,907,139,807.

Rincian Belanja Barang

URAIAN	2025
Belanja Barang dan Jasa	10,065,565,837
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	157,780,732
Belanja Pemeliharaan	418,135,121
Belanja Perjalanan	1,267,709,349
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	0
Jumlah Belanja Kotor	11,909,191,039
Pengembalian Belanja	2,051,232
Jumlah Belanja	11,907,139,807

Belanja barang pada BPSPL Pontianak telah mencapai 77,06 persen.

Belanja Modal

Rp

7,101,465,266

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 7,101,465,266. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian Realisasi Belanja Modal

URAIAN	2025
Belanja Modal Tanah	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,101,465,266
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
Belanja Modal Lainnya	0
Jumlah Belanja Kotor	7,101,465,266
Pengembalian	0
Jumlah Belanja	7,101,465,266

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada Belanja Modal Tanah pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 7,101,465,266.

Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	2025
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,101,465,266
Belanja Modal BLU	0
Jumlah Belanja Kotor	7,101,465,266
Pengembalian	0
Jumlah Belanja	7,101,465,266

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp
200,000,000*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 200,000,000. Kas tersebut adalah senilai nilai UP sesuai pengajuan awal tahun. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp 0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Nilai tersebut merupakan nilai pajak yang dibayarkan di bulan Oktober.

*Piutang PNB
Rp 0*

C.4 Piutang PNB

Tidak terdapat Piutang PNB pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak ada Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025 .

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak ada Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025 .

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Tidak ada Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025 .

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp 0*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak ada Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025 .

*Persediaan
Rp 4,883,425*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 4,883,425.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan sudah di distribusi ke unit masing – masing.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak ada Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak ada Tagihan Penjualan Angsuran pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per Desember 2024.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Tidak ada Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025.

*Tanah
Rp
16,176,340,000*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp 16,176,340,000. Tidak ada penambahan atas nilai Aset tanah pada TA 2025. Tanah tersebut seluas 7.402 meter persegi berlokasi di Jalan Husein Hamzah Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

*Peralatan dan
Mesin
Rp
13,989,194,464*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah Rp 13,989,194,464. Terdapat penurunan nilai Peralatan dan Mesin dari 6,887,729,198 pada September 2025 menjadi 13,989,194,464 per 31 Desember 2025 karena terdapat belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp 7,101,465,266.

Gedung dan

Bangunan

Rp

4,221,848,220

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah Rp 4,221,848,220. Tidak terdapat peningkatan nilai Gedung dan Bangunan selama Tahun 2025.

Jalan.Jaringan

dan Irigasi

Rp690,656,250

C.17 Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 690,656,250. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap

Lainnya

Rp0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp 0.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan Rp

0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap Rp

(7,503,303,265)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 Rp (7,503,303,265). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	7,250,732,269	6,269,174,900	981,557,369
2	Gedung dan Bangunan	4,053,588,220	751,701,495	3,301,886,725
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	690,656,250	482,426,870	208,229,380
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		11,994,976,739	7,503,303,265	4,491,673,474

Aset Tak

Berwujud Rp 0

C.21 Aset Tak Berwujud

Tidak ada Aset Tak Berwujud pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025.

Aset Lain-Lain

Rp 0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain – lain per 31 Desember 2025 adalah Rp 0. Aset Lain – lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi

Penyusutan

dan Amortisasi

Aset Lainnya

Rp 0

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	0	0	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Uang Muka

dari KPPN Rp 0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada

Pihak Ketiga Rp

222,142,218

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 222,142,218. Utang kepada pihak ketiga terdiri dari belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp 222,142,218. Dengan rincian sebagai berikut :

Utang Pihak Ketiga Desember 2025	
Outstanding Kontrak	200,000,000
Tagihan Listrik 12-2025	14,538,988
Tagihan Telepon 12-2025	7,353,530
Tagihan Air 12-2025	249,700
Total	222,142,218

Pendapatan

yang

Ditangguhkan

Rp 0

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak ada Pendapatan yang Ditangguhkan pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025.

Pendapatan

Diterima di

Muka Rp 0

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak ada Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025.

Beban yang

Masih Harus

Dibayar Rp 0

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak ada Beban yang Masih Harus Dibayar pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025.

Utang Yang
Belum
Ditagihkan Rp
0

C.29 Utang Yang Belum Ditagihkan

Terdapat Utang Yang Belum Ditagihkan pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.

Ekuitas
Rp
27,557,476,876

C30. Ekuitas

Pada Laporan Keuangan Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp 27,557,476,876. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp
2,232,768,940

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2,232,768,940. Jumlah tersebut tidak sama dengan nilai pada LRA sebesar Rp 2,245,211,031, terdapat selisih sebesar Rp 12,442,091. Nilai selisih pendapatan tersebut karena terdapat pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi atas penggunaan rumah dinas, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan atas Pelepasan Aset.

Beban Pegawai
Rp
7,191,137,406

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai tersaji pada Laporan Keuangan 31 Desember 2025 sebesar Rp 7,191,137,406.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

URAIAN	2025
Beban Gaji Pokok PNS	2,238,070,640
Beban Pembulatan Gaji PNS	32,013
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	125,844,320
Beban Tunj. Anak PNS	36,745,542
Beban Tunj. Struktural PNS	25,200,000
Beban Tunj. Fungsional PNS	330,390,000
Beban Tunj. PPh PNS	16,931,061
Beban Tunj. Beras PNS	109,281,780
Beban Uang Makan PNS	279,066,000
Beban Tunjangan Umum PNS	28,880,000
Beban Gaji Pokok PPPK	196,024,400
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,237
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	9,671,280
Beban Tunj. Anak PPPK	2,126,472
Beban Tunj. Fungsional PPPK	29,160,000
Beban Tunj. Beras PPPK	8,980,080
Belanja Uang Makan PPPK	32,745,000
Beban Tunjangan Umum PPPK	1,665,000
Beban Uang Lembur	113,701,000
Beban Uang Lembur PPPK	5,087,000
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,331,224,735
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	270,307,846
Jumlah Beban	7,191,137,406

Tidak terdapat perberbedaan nilai LO dengan nilai pada LRA.

Beban Persediaan

Rp 155,807,707

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan yang tersaji pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 155,807,707. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang – barang yang habis pakai, termasuk barang – barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Terdapat perbedaan nilai antara LO dengan LRA, LRA tercatat senilai Rp 157,780,732. Selisih senilai Rp 1,973,025 adalah .

*Beban Barang dan
Jasa Rp
10,066,347,077*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Pada Laporan Keuangan jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp 10,066,347,077. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	2025
Beban Keperluan Perkantoran	356,133,094
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,758,950
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	122,400,000
Beban Honor Operasional Lainnya	0
Beban Barang Operasional Lainnya - Pandemi Covid-19	0
Beban Bahan	1,222,623,460
Beban Persediaan Konsumsi	0
Beban Barang Operasional Lainnya	24,957,645
Beban Langganan Listrik	153,596,771
Beban Langganan Telepon	93,463,819
Beban Langganan Air	10,291,113
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0
Beban Sewa	2,927,215,000
Beban Jasa Profesi	83,000,000
Beban Jasa Lainnya	5,066,907,225
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0
Jumlah	10,066,347,077

Terdapat perbedaan nilai antara LO dengan LRA pada beban barang dan jasa. Pada LRA tercatat senilai Rp 11,907,139,807. Selisih senilai Rp 1,840,792,730 adalah nilai atas sewa kantor di seluruh wilayah kerja BPSPL Pontianak selama 3 tahun dan tagihan listrik, air, telepon bulan desember 2025.

Beban

*Pemeliharaan Rp
418,135,121*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 418,135,121. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Untuk beban persediaan bahan untuk pemeliharaan dengan pilihan kode akun. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN JENIS BEBAN	2025
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110,752,626
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	307,382,495
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	0
Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	0
Jumlah	418,135,121

Beban pemeliharaan Gedung dan bangunan di Pontianak dilaksanakan perbaikan mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal bukan menambah nilai aset. Tidak terdapat perbedaan nilai antara LO dengan LRA.

Beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin di Pontianak dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan, perbaikan peralatan dan mesin berupa personal computer, printer, genset, AC, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 dan inventaris kantor lainnya.

Beban Perjalanan

*Dinas Rp
1,266,869,349*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1,266,869,349. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan

dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN JENIS BEBAN	2025
Beban Perjalanan Biasa	1,219,113,349
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	35,236,000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,520,000
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0
Jumlah	1,266,869,349

Tidak terdapat selisih nilai perjalanan dinas antara LO dengan LRA.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing – masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp
1,426,025,054*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1,426,025,054. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2025
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,277,022,419
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	93,571,756
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	48,873,777
Beban Penyusutan Irigasi	4,358,720
Beban Penyusutan Jaringan	2,198,382
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,426,025,054

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Surplus/ Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional Rp -
8,356,446*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp 8,356,446. Rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

URAIAN	2025
Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,356,446
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	8,356,446

Pos Luar Biasa Rp0 **D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. Tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
21,886,141,756*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 21,886,141,756.

*Defisit LO
Rp
(18,283,196,328)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Pada Laporan Keuangan Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp (18,283,196,328). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai
Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode

sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2024.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Persediaan Aset
Tetap/Aset
Lainnya Rp0*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp 0*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp 0. Nilai ini adalah koreksi pencatatan modul aset tetap atas konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

*Transaksi Antar
Entitas Rp
23,954,531,448*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp 23,954,531,448. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2025
Ditagihkan ke Entitas Lain	26,199,742,479
Diterima dari Entitas Lain	(2,245,211,031)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	23,954,531,448

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) / Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain / Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas

pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025. DKEL sebesar Rp 26,199,742,479 sedangkan DDEL sebesar Rp -2,245,211,031.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk dan Transfer Keluar per tanggal 31 Desember 2025 pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak adalah masing – masing sebesar Rp 0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Tidak ada Pengesahan Hibah Langsung maupun Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per tanggal 31 Desember 2025 pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak.

*Ekuitas Akhir Rp
27,557,476,876*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 27,557,476,876.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN – KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada Kejadian Penting yang dialami Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak berdiri pada tahun 2009. Adapun Struktur Organisasi Keuangan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak TA. 2025 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran :

Syarif Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen :

Eki Saputra Risja, S.E

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Anggun Nurlisa, S.St.Pi

Bendahara Pengeluaran :

Pramita Putri Utami

Bendahara Penerimaan :

Yulianti Sri Rejeki, S.Pi

Operator Modul GLP :

Eki Saputra Risja, S.E

Operator Modul BMN :

Hendrikus Luat Maring

Operator Modul Persediaan :

M. Andry Wiratman, S.Pi

2. Pagu DIPA BPSPL Pontianak Tahun Anggaran 2025 bersumber dari 2 yaitu Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sampai dengan 31 Desember 2025 data pagu anggaran dan

realisasi berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut :

Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi
Rupiah Murni	10,910,579,000	10,227,331,709 (93,8%)
PNBP	19,635,000,000	15,972,410,770 (81,35%)

3. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah dilaksanakan revisi sebanyak 19 kali. Penjelasan atas Revisi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak adalah sebagai berikut :

1) Revisi ke-1 POK (30 Januari 2025)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka revisi komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor berupa belanja listrik, air dan barang konsumsi serta operasional kendaraan lainnya yang akan disiapkan untuk membantu biaya pemeliharaan.

2) Revisi ke-2 POK (6 Februari 2025)

Revisi POK kewenangan KPA dalam rangka revisi komponen operasional dan pemeliharaan kantor berupa belanja keperluan perkantoran, belanja barang persediaan barang konsumsi dan penyesuaian revisi terhadap kegiatan layanan kepegawaian lingkup bpspl pontianak.

3) Revisi ke-3 DJA (25 Februari 2025)

Revisi Kewenangan DJA dalam rangka penyesuaian jumlah anggaran dengan kode Blokir 2 dan A pada DIPA BPSPL Pontianak. Dimana jumlah kode blokir 2 yang ditetapkan sebanyak Rp. 1.567.600.000 dan kode blokir A

sebanyak Rp. 4.101.040.000. Selanjutnya UPT juga menyesuaikan jumlah blokir tersebut dengan total jenis Belanja Perjalanan Dinas (524xxx) yang harus dipenuhi di masing-masing kegiatan BPSPL Pontianak.

4) Revisi ke-4 POK (4 Maret 2025) :

Revisi POK kewenangan KPA dalam rangka revisi redaksi detail pada beberapa kegiatan teknis seperti Kegiatan Rekomendasi Rekomendasi Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil, Sosialisasi KKPRL dan beberapa perjalanan dinas yang terdampak nilai blokir pada kegiatan Dukungan Manajemen.

5) Revisi ke-5 DJA (14 April 2025)

Revisi Kewenangan DJA dalam rangka penyesuaian jumlah blokir kode A dan 2, dimana terdapat usulan pembukaan blokir A pada Dirjen PKRL. BPSPL Pontianak sendiri memiliki nilai blokir A yang diusulkan sebesar Rp. 153.842.000 yang berasal dari akun Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Biasa dalam Kota.

6) Revisi ke-6 KANWIL (22 April 2025)

Revisi POK dan penyesuaian Halaman III DIPA kewenangan Kanwil DJPb Kalimantan Barat. Revisi ini merupakan bagian dari updating realisasi TW I dan target yang akan dicapai di Triwulan II sebesar 34.37%. Adapun persen realisasi di TW I adalah sebesar 17.47% yang memiliki nilai IKPA maksimal karena adanya kebijakan pelonggaran perhitungan nilai IKPA oleh Kementerian Keuangan.

7) Revisi ke-7 DJA (2 Juli 2025)

Revisi Kewenangan DJA dalam rangka buka blokir kode 2 di DIPA BPSPL Pontianak. Nilai buka blokir kode 2 yang berhasil dilakukan adalah sebesar Rp. 2.393.140.000 yang berasal dari sumber anggaran PNBPN. Buka blokir ini terdapat pada semua jenis kegiatan teknis yang dimiliki (2362, 2365 dan 2366) dari total anggaran PNBPN sebesar Rp. 5.425.000.000.

8) Revisi ke-8 Kanwil (10 Juli 2025)

Revisi POK dan penyesuaian Halaman III DIPA kewenangan Kanwil DJPb Kalimantan Barat. Revisi ini merupakan bagian dari updating realisasi TW II dan target yang akan dicapai di Triwulan III sebesar 48,92%. Adapun persen realisasi di TW II adalah sebesar 30.46%.

9) Revisi ke-9 POK (8 September 2025)

Revisi POK kewenangan KPA dalam rangka perbaikan detail minus pada belanja barang kegiatan 2362 baik yang terdapat didalam KRO PBW, PEE, QMA, PCA dan SCC. Termasuk optimalisasi akun dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah terjadi pada Triwulan III.

10) Revisi ke-10 POK (29 September 2025)

Revisi POK kewenangan KPA dalam rangka perbaikan detail dan akun minus Gaji (Belanja 51) diluar dari minus Belanja Akun Tunjangan Kinerja dan Akun Uang Makan. Penambahan detail seperti Sewa Kendaraan Insidentil di Kalimantan Barat (002) dan revisi nama sub-komponen kegiatan kehumasan.

11) Revisi ke-11 KANWIL (13 Oktober 2025)

Revisi POK dan penyesuaian Halaman III DIPA kewenangan Kanwil DJPb Kalimantan Barat.

Revisi ini merupakan bagian dari updating realisasi TW III dan target yang akan dicapai di Triwulan IV sebesar 100%. Adapun persen realisasi di TW III adalah sebesar 66.49%.

12) Revisi ke-12 POK (15 Oktober 2025)

Revisi POK kewenangan KPA dalam rangka penyesuaian belanja minus pada masing-masing detail belanja operasional perkantoran dan alokasi belanja sewa mobil sebanyak 1 Unit pada Kegiatan 2367 (Dukungan Manajerial).

13) Revisi ke-13 POK (1 November 2025)

Revisi Kewenangan DJA dalam rangka penambahan anggaran sumber alokasi PNBPN sebesar Rp. 14.210.000.000 dimana penambahan ini berdampak pada beberapa Kegiatan Teknis seperti 2362, 2363, dan 2366. Penambahan anggaran belanja terjadi baik pada belanja barang (52) sebesar Rp.7.103.000.000 dan belanja modal (53) sebesar Rp.7.107.000.000.

14) Revisi ke-14 POK (12 November 2025)

Revisi Kewenangan KPA dalam rangka penyesuaian nilai-nilai Belanja Jasa Lainnya dan Belanja Modal pada anggaran tambahan PNBPN untuk persiapan dalam memulai kontrak.

15) Revisi ke-15 POK (12 Desember 2025)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka penyesuaian realisasi belanja pada masing-masing kegiatan teknis yang berdampak penambahan Anggaran PNBPN seperti penyesuaian belanja bahan pelayanan, survey potensi, jasa lainnya yang telah diselesaikan dan

akan berjalan serta revisi anggaran 51 belanja pegawai berupa belanja uang makan dan gaji.

16) Revisi ke-16 POK (22 Desember 2025)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka penyesuaian belanja Jasa Lainnya dan optimalisasi detail minus pada belanja akun 53 (modal) yang telah mencapai 90% target rencana kontrak. Serta perubahan alokasi sewa dan optimalisasi rencana belanja sewa pada KRO Belanja Sarpras Pelayanan.

17) Revisi ke-17 POK (23 Desember 2025)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka penyesuaian dan perbaikan jenis akun pada belanja rencana kegiatan (Jasa Lainnya) serta perbaikan detail-detail dukman yang mengalami minus dan penyesuaian belanja bahan pada KRO Perencanaan Ruang Laut.

18) Revisi ke-18 POK (23 Desember 2025)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka optimalisasi akun-akun yang masih memiliki sisa belanja seperti belanja bahan, sewa dan lainnya. Selain itu untuk perbaikan detail minus pada belanja modal (53) baik pada KRO RAL 2362 maupun KRO RAL 2366.

19) Revisi ke-19 POK (26 Desember 2025)

Revisi POK Kewenangan KPA dalam rangka perbaikan minus belanja honorarium Enumerator pada KRO Teknis 2362 – PCA terkait Pelayanan Jenis Ikan Dilindungi dan atau Appendiks CITES, selain itu optimalsiasi rencana realisasi pada kegiatan Penataan Ruang Laut.

4. BPSPL Pontianak tahun 2025 menyelenggarakan PIPK dengan menetapkan 3 akun signifikan yaitu :

1) 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada kas di bendahara pengeluaran dilakukan pengumpulan dokumen pendukung yaitu surat terkait UP, SP2D, LPJ bulanan, SPBy, BA kas, rekening koran.

2) 425259 Pendapatan Perizinan Lainnya

Pada pendapatan perizinan lainnya dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen terkait rekomendasi perijinan SAJI, data Simponi, LPJ bendahara penerimaan, laporan realisasi pendapatan.

3) 132111 Peralatan dan Mesin

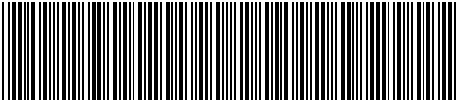
Pada peralatan dan mesin dokumen terkait dalam data dukung PIPK adalah dokumen terkait kontrak, kuitansi, BAST, Neraca dan Posisi BMN, SIMAN.

Telah diselesaikan Laporan Hasil PIPK setelah melalui tahanan revidi dan perbaikan.

5. Pada pagu BPSPL Pontianak terdapat Program Prioritas Nasional dengan penjelasan pagu dan realisasi untuk periode s.d 31 Desember 2025 sesuai dokumen terlampir.

6. Pelaporan capaian output BPSPL Pontianak telah berlangsung sejak Januari sd Desember 2025. Dengan detail capaian RO sesuai dokumen terlampir.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025
I A. INFORMASI KINERJA



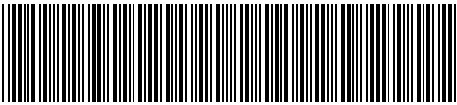
DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Halaman : I A. 1

Program	:	032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				4.350.000.000	
Kegiatan	:	2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan				4.350.000.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2362.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan			200.000.000	
Rincian Output	:	01	PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	(PN)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2362.PCA	Perizinan Produk			1.752.592.000	
Rincian Output	:	01	PCA.002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan		5.00	Produk	1.752.592.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2362.PEE	Kemitraan			150.000.000	
Rincian Output	:	01	PEE.001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	(PN)	1.00	Kesepakatan	150.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	2362.QMA	Data dan Informasi Publik			1.211.218.000	
Rincian Output	:	01	QMA.001	Data dan Informasi Konservasi Ekosistem	(PN)	1.00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi dokumen	661.218.000
			02	QMA.002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	4.00	dokumen	550.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	2362.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan			113.500.000	
Rincian Output	:	01	RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	(PN)	5.00	Unit	113.500.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	2362.REB	Konservasi Jenis/Spesies			572.690.000	
Rincian Output	:	01	REB.001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)	(PN)	2.00	Jenis	572.690.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025
I A. INFORMASI KINERJA

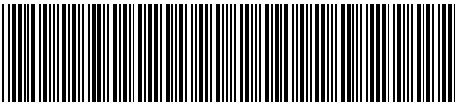


DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Konservasi Jenis/Spesies					Jenis		
Klasifikasi Rincian Output	7	:	2362.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	39,00	Orang, Kegiatan	350.000.000
Rincian Output	:	01	SCC.001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya (PN)	15.00	Orang	100.000.000
	:	02	SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya (PN)	24.00	Orang	250.000.000
Program	:	032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				1.075.000.000
Kegiatan	:	2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				200.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	2365.PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000.000
Rincian Output	:	01	PBW.001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	200.000.000
Kegiatan	:	2366	Penataan Ruang Laut				875.000.000
	:						
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2366.PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	875.000.000
Rincian Output	:	01	PBT.009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	875.000.000
Program	:	032.07.WA	Program Dukungan Manajemen				11.421.280.000
Kegiatan	:	2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut				11.421.280.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 032.07.2.477425/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:9474-4515-0420-0784

Kementerian Negara/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (477425) BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

Klasifikasi Rincian Output	1	:	2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.140.980.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	4.00	Layanan	35.780.000
		:	02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	45.300.000
		:	03	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	64.000.000
		:	04	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	109.900.000
		:	05	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	10.886.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	2367.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	30,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	83.900.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	30.00	Orang	83.900.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	196.400.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	60.000.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	80.100.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	56.300.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

ttd.
Victor Gustaaf Manoppo
NRP. 69030175



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : DESEMBER satker : 477425

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)						GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti	Action			
									Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini										Catatan	Validasi		
														RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO												TPCRO (%)	PCRO (%)
1	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	FD	2362	PBW001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	200,000,000	32,708,000	16.35	2	RekomendasiKebijakan	2.00	95.00	84.91	2.0000	2.00	100.00	83.65	01	PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan output 2 dokumen adalah: 1. Penilaian EVIKA di Kawasan Konservasi Mahakam Wilayah Hulu Kab. Kutai Kartanegara dengan output nilai 59.1. 2. Fasilitasi Daerah dalam Penilaian EVIKA KKD dengan output 1 provinsi (Kalimanta Timur). Terdapat adanya efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.		00 - Data Valid		06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

2	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	FD	2362	PCA002	Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	4,199,997,000	2,899,651,431	69.04	5	Produk	5.00	66.95	24.19	5.0000	5.00	100.00	30.96	01	Non PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan volume 5 dokumen/jenis (hiu appendiks, pari appendiks, arwana formosus, arwana brazil, teripang, dan huaya) berupa: 1. Pelayanan Operasional Perizinan (Verifikasi SIPJI, SAJI dan Rekomendasi). 2. Pendataan Hiu dan Pari (Appendiks). 3. Survei Pemanfaatan Jenis Teripang di Bontang, Kalimantan Timur pada 7 s.d. 12 Desember 2025. 4. Audit Pengembangbiakkan Arwana di Kalimantan pada Desember 2025. 5. Pelatihan Drone di Kubu Raya, Kalimantan Barat pada 13 dan 14 Desember 2025. 6. Pelatihan Komunikasi Visual dan Videografi bagi Petugas Pelayanan Publik di Kubu Raya, Kalimantan Barat pada 15 dan 16 Desember 2025. 7. Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik yang Prima di Kubu Raya, Kalimantan Barat pada 17 s.d. 19 Desember 2025. Terdapat pelaksanaan kegiatan daring karena efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid	06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
3	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	FD	2362	PEE001	Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	150,000,000	40,224,000	26.82	1	Kesepakatan	1.00	95.00	73.18	1.0000	1.00	100.00	73.18	01	PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan output 4 PKS, meliputi: 1. PKS BPSPPL Pontianak - Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura. 2. PKS BPSPPL Pontianak - Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI). 3. PKS BPSPPL Pontianak - Yayasan WEBE Konservasi. 4. PKS BPSPPL Pontianak - Politeknik Negeri Pontianak. Terdapat pelaksanaan kegiatan daring karena efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid	06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

4	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	FD	2362	QMA001	Data dan Informasi Konservasi Ekosistem	931,218,000	771,918,658	82.89	1	dokumen	1.00	52.96	27.70	1.0000	1.00	100.00	17.11	01	PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan output 1 dokumen (Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu Kab. Kutai Kartanegara) meliputi: 1. Survei Jenis dan Biota Dilindungi. 2. Monitoring Sosial Ekonomi. 3. Identifikasi Aktivitas Pemanfaatan dan Kesesuaian Zonasi. 4. Pendataan Kondisi Ikan Ekonomis Penting. 5. Monitoring Pengelolaan dan Zonasi. Terdapat efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid		06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
5	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	FD	2362	QMA002	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	550,000,000	183,026,000	33.28	4	dokumen	4.00	95.00	66.72	4.0000	4.00	100.00	66.72	01	Non PN	Realisasi s.d. Desember 2025 dengan output 4 dokumen/jenis meliputi: 1. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Terubuk di Kalimantan Barat. 2. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Kima di Kalimantan Barat. 3. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Pari Air Tawar di Kalimantan Barat. 4. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Lola di Kalimantan Barat. 5. Penyediaan Data dan Informasi Populasi Pesut di Kalimantan Timur. Terdapat efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid		06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

6	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	FD	2362	RAL001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Ekosistem	8,606,500,000	8,076,948,586	93.85	5	Unit	5.00	95.00	40.16	5.0000	5.00	100.00	6.15	01	PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan 5 Output (Sarana Pendukung Penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut) meliputi: 1. Belanja Sewa (Sewa Kantor/Pos Pelayanan di Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Di Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sewa Roda 4) 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Peralatan Selam, AC, Meubelair, Indoor LED, Video Conference Camera, Mesin Penghancur Kertas, Sarana Komunikasi Pelayanan, Sarana Penyadartahuan, RTK Drone, ROV, TV, Pad Sacnner RFID, Videotron, Printer dan Scanner, dll.) Terdapat efisiensi anggaran dan penambahan anggaran PNBSP. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid	06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
7	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	FD	2362	REB001	Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix Cites (kumulatif)	1,372,285,000	1,180,885,000	86.05	2	Jenis	2.00	67.93	21.21	2.0000	2.00	100.00	13.95	01	PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan output 2 dokumen/jenis (karang dan mamalia laut) yaitu: 1. Pembuatan Stock Center Karang, 2. Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah. Selama 2025, terdapat 136 kejadian yang meliputi jenis Buaya, Dugong, Hiu Paus, Lumba-Lumba, Pari Air Tawar, Pari Manta, Paus, Penyu Sisik, Penyu Hijau, dan Pesut. Terdapat efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid	06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

8	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	FD	2362	SCC001	Pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya	100,000,000	80,100,000	80.10	15	Orang	15.00	95.00	19.90	15.0000	15.00	100.00	19.90	01	PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan output 15 orang yaitu Pelatihan Aerial Survey di Kawasan Konservasi secara daring dan luring (praktik di Balikpapan) pada 5 s.d. 10 Agustus 2025. Terdapat efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid		06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
9	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	FD	2362	SCC002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	250,000,000	22,480,000	8.99	24	Orang	24.00	95.00	91.01	24.0000	24.00	100.00	91.01	01	PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan output 24 orang yaitu Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi bagi Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi pada 28 Agustus 2025 secara daring. Terdapat pelaksanaan kegiatan daring karena efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid		06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
10	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	HB	2363	PBW006	Rekomendasi Kebijakan Berusaha Jasa Kelautan	700,000,000	699,757,450	99.97	1	RekomendasiKebijakan	1.00	50.00	12.14	1.0000	1.00	100.00	0.03	00	PN	Realisasi Kegiatan s.d. Desember 2025 dengan capaian 1 Dokumen yaitu Gerai Jasa Bahari dan Penyadartahuan Pemanfaatan Jasa Bahari yang dilaksanakan di Jawa Tengah, DK Jakarta, dan Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid		06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
11	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	HB	2365	PBW001	Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	200,000,000	199,822,692	99.91	1	RekomendasiKebijakan	1.00	0.15	8.09	1.0000	1.00	100.00	0.09	00	PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan capaian 1 Dokumen yaitu 10 Pulau yang telah teridentifikasi (8 di Kalimantan Timur dan 2 di Kalimantan Barat), 90 Pelaku usaha dengan Potensi PNPB dengan Rp 1.417.908.887,50. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid		06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

12	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	HB	2366	PBT009	Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	1,241,000,000	654,222,273	52.72	1	RekomendasiKebijakan	1.00	73.94	55.06	1.0000	1.00	100.00	47.28	01	PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan capaian 1 dokumen meliputi Verifikasi Teknis, Penilaian Teknis, dan Penilaian Kepatuhan KKPRL. Terdapat pelaksanaan kegiatan daring karena efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid		06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
13	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	HB	2366	RAL001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	1,134,000,000	1,130,666,680	99.71	10	Unit	10.00	50.00	51.51	10.0000	10.00	100.00	0.29	00	PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan 10 Output (Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut) meliputi: 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (RTK Drone, Printer, Scanner, AC, Meubelair, Kamera, Sarana Komunikasi, Sarana Penyadartahuan, dll). Terdapat penambahan anggaran PNBK. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid		06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
14	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	WA	2367	EBA956	Layanan BMN	20,140,000	20,135,928	99.98	4	Layanan	4.00	3.34	0.02	4.0000	4.00	100.00	0.02	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		05-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
15	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	WA	2367	EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	29,800,000	29,763,150	99.88	1	Layanan	1.00	8.37	0.92	1.0000	1.00	100.00	0.12	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		05-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
16	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	WA	2367	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	37,600,000	37,593,252	99.98	1	Layanan	1.00	8.37	8.37	1.0000	1.00	100.00	0.02	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		05-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
17	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	WA	2367	EBA962	Layanan Umum	58,800,000	58,766,560	99.94	1	Layanan	1.00	8.37	8.37	1.0000	1.00	100.00	0.06	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		05-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
18	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	WA	2367	EBA994	Layanan Perkantoran	10,591,395,000	9,914,493,760	93.61	1	Layanan	1.00	8.37	8.37	1.0000	1.00	100.00	6.39	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		05-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
19	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	WA	2367	EBC954	Layanan Manajemen SDM	47,600,000	47,567,952	99.93	30	Orang	30.00	21.70	23.18	30.0000	30.00	100.00	0.07	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		05-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK

20	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	WA	2367	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	54,844,000	54,765,862	99.86	1	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.0000	1.00	100.00	0.14	00	Non PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan capaian 1 Dokumen yaitu: 1. Perencanaan Kinerja Tahun 2025 (Perjanjian Kinerja, Rincian Target, Manual IKU, Matriks Peran Hasil, Rencana Aksi, Rencana Kerja Tahunan, dll). 2. Perencanaan Anggaran (Indikatif, Definitif, dan AWP LAUTRA). Terdapat kegiatan yang dilaksanakan secara daring karena adanya efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid	06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
21	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	WA	2367	EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	40,500,000	40,499,317	100.00	1	Dokumen	1.00	25.65	14.01	1.0000	1.00	100.00	0.00	00	Non PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan capaian 1 Dokumen yaitu: 1. Dokumen SAKIP 2. Laporan SPIP MR 3. Laporan Capaian Output 4. Laporan Kinerja Terdapat kegiatan yang dilaksanakan daring karena adanya efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid	06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-
22	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	03207	12	WA	2367	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	29,900,000	29,900,000	100.00	1	Dokumen	1.00	0.54	17.37	1.0000	1.00	100.00	0.00	00	Non PN	Realisasi kegiatan s.d. Desember 2025 dengan capaian 1 dokumen adalah penyusunan laporan keuangan dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK). Terdapat kegiatan yang dilaksanakan secara daring karena adanya efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut diperhitungkan sebagai PCRO.	00 - Data Valid	06-JAN-26	06-JAN-26	Lihat catatan	-



REKAP KERTAS KERJA CAPAIAN OUTPUT

periode : DESEMBER

No	Kanwil DJPB	KPPN	Kode BAES1 Satker	Nama Satker	DIPA Revisi Ke-	Jumlah output DIPA	Konfirmasi Capaian Output			Validasi Capaian Output			% Data Masuk/Upload	Jumlah Kiriman Data Sakti	DIPA Revisi Ke (Sakti)	Tanggal Pertama Kirim Sakti	Terakhir Posting OMSPAN	Action	Periode Upload Data
							Terkonfirmasi	Tidak Terkonfirmasi	Jumlah	Data Valid	Data Tidak Valid	Jumlah							
1	K16	042	03207.477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	9	22	22	0	22	22	0	22	100.00	1	9	06-01-2026 15:48:41	06-01-2026 18:00:05	Open	
Total						22	22	0	22	22	0	22	100.00						